

## **EVALUASI KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER BIDANG PENDIDIKAN DI PROPINSI LAMPUNG**

Oleh:

**Rahayu Sulistiowati, Meilyana dan Intan Fitri Meutia**

Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung

### **ABSTRACT**

This study aims to describe the problems experienced by prospective workers and tries to identify the factors that contribute to these problems, and describes the management of workers by the Department of Labor District Pringsewu.

This research type is a descriptive analysis. The unit of analysis in this study were 10 former workers (TKI) that all are women who residing in Pekon Pujodadi, District Pardasuka, Pringsewu Regency. Informants also from The Department of Labor, that is Head of Labor (Kasi naker) and a former migrant worker who had helped prospective workers on dealing with documents and procedures.

The study found that problems experienced by migrant workers started from rural origin, pertaining to administrative proceedings before leaving for work in the destination country to issue such documents. In the destination country, the problems identified such as mismatches jobs promised to those obtained, and also the language barrier. After got back to home country (Indonesia) they got benefit economically but the use of remittance could not be optimal due to daily consumption. It is known that the local government of Pringsewu Regency not paying attention and making human resource development of workers as an efforts of development investments. It can be seen there is no enough budget allocated for integrated management of workers.

**Keywords: development, workers, the role of local government**

### **I. PENDAHULUAN**

Pendidikan masyarakat merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Sejatinnya pengembangan pendidikan masyarakat merupakan upaya peningkatan kemampuan personal orang dewasa sebagai anggota masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai investasi masyarakat pembelajaran dalam proses pendidikan sepanjang hayat. Seiring dengan kecenderungan perkembangan dan tuntutan masyarakat yang makin kompleks, kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal makin berkembang. Dengan demikian, untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat, maka disusun buku petunjuk teknis sebagai acuan untuk mengajukan pelaksanaan program pendidikan melalui APBN 2012.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Program Peningkatan Kapasitas Pokja Pengarustamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan Propinsi dan Kabupaten/Kota 2012 – Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2012

Kebijakan responsif gender (pengarusutamaan gender/PUG) merupakan perjalanan panjang dari usaha global dan nasional dalam menanggapi kesenjangan gender dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Hal ini tercermin dari berbagai kesepakatan global antara lain Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) yang diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Tonggak sejarah dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender diukir dalam Konferensi Perempuan Sedunia ke 4 di Beijing tahun 1995 yang menghasilkan suatu kerangka kerja kebijakan global untuk memajukan kesetaraan gender. Kebijakan global tersebut ditindaklanjuti oleh Pemerintah Indonesia dengan ditetapkannya Instruksi Presiden (INPRES) No 9 Tahun 2000, yang menginstruksikan seluruh kementerian/lembaga di tingkat nasional dan daerah untuk mengarusutamakan gender atau responsive terhadap gender dalam berbagai aspek kegiatan pembangunan.

Komitmen untuk melakukan pengarusutamaan gender bidang pendidikan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus dikawal dan diimplementasikan melalui penguatan kapasitas pengambil kebijakan di daerah (provinsi / kabupaten / kota). Mulai tahun 2003 sudah dimulai upaya untuk memfasilitasi dan mengadvokasi provinsi dalam rangka memperkuat komitmen para pengambil kebijakan agar setiap kebijakan, program, dan kegiatan dalam bidang pembangunan pendidikan di daerah dapat mengintegrasikan dimensi keadilan dan kesetaraan gender. Sementara kabupaten/kota baru diberikan fasilitasi dan advokasi mulai tahun 2008, dan sampai dengan akhir tahun 2011 sudah menjangkau 244 kabupaten/kota. Mengingat masih banyaknya kabupaten/kota yang belum dapat difasilitasi, maka perlu dilakukan model akselerasi implementasi PUG bidang pendidikan agar dimensi keadilan dan kesetaraan gender dapat dengan segera masuk ke dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pendidikan di kabupaten/kota.<sup>24</sup>

Pemerintah Propinsi Lampung sendiri telah menunjukkan keseriusan dalam pembangunan bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) hal ini diwujudkan melalui Perda No. 10 tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Adapun tolak ukur keberhasilan strategi pengarusutamaan gender ini adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Propinsi Lampung dalam bidang-bidang kebijakan pembangunan masyarakat, salah satunya pada bidang pendidikan.

Dalam hal Akses dan pemerataan pendidikan, indikatornya yang digunakan diantaranya: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Putus Sekolah, Angka mengulang kelas, angka penerimaan Beasiswa, Angka Buta Aksara, angka melek aksara. Dalam hal mutu dan relevansi pendidikan dianalisis dari keberadaan materi bahan ajar yang bias gender, proporsi penulis bahan ajar perempuan terhadap laki-laki, proporsi siswa perempuan terhadap siswa laki-laki menurut program studi pada jenis pendidikan kejuruan dan jenjang perguruan tinggi. Dalam hal manajemen pendidikan indikatornya manajemen pendidikan dianalisis dgn menggunakan informasi seperti: adakah kebijakan pemerintah termasuk pemerintah daerah yang

---

<sup>24</sup> Ibid.

bias gender?, apakah pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut sudah benar dan tidak menyebabkan kesenjangan gender?, kemudian mengenai proporsi perempuan dan laki-laki dalam perumusan dan pengambilan keputusan bagaimana?. Karena kondisinya ternyata pejabat struktural, kepala sekolah didominasi jenis kelamin tertentu yang akhirnya kebijakannya kurang responsif gender. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimanakah penerapan Perda No.10 tahun 2011 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah Propinsi Lampung khususnya dalam rumusan kebijakan bidang pendidikan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat “membuahkan hasil”, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan (Darwin dalam Widodo, 2001:212). Evaluasi kebijakan publik tidak hanya untuk melihat hasil (*outcomes*) atau dampak (*impacts*), akan tetapi dapat pula untuk melihat bagaimana proses implementasi suatu kebijakan dilaksanakan. Islamy (2003:112), menyatakan bahwa:

“Penilaian kebijaksanaan adalah merupakan langkah terakhir dari suatu proses kebijaksanaan. Sebagai salah satu aktivitas fungsional, penilaian kebijaksanaan tidak hanya dilakukan dengan mengikuti aktivitas-aktivitas sebelumnya yaitu pengesahan dan pelaksanaan kebijaksanaan, tetapi dapat terjadi pada seluruh aktivitas-aktivitas fungsional yang lain dalam proses kebijaksanaan. Dengan demikian penilaian kebijaksanaan dapat mencakup tentang: isi kebijaksanaan; penilaian kebijaksanaan; dan dampak kebijaksanaan. Jadi, penilaian kebijaksanaan dapat dilakukan pada fase perumusan masalahnya; formulasi usulan kebijaksanaan; implementasi; legitimasi kebijaksanaan, dan seterusnya”.

Dengan demikian spesifikasi merupakan aktivitas evaluasi yang tercepat, yaitu cara dimana “manfaat” harus dinilai atau dipertimbangkan. Pengukuran (*measurement*), secara sederhana mengacu pada pengumpulan informasi yang relevan dengan tujuan kebijakan. Analisis adalah penyerapan dan penggunaan informasi yang dikumpulkan guna membuat kesimpulan. Rekomendasi, aktivitas terakhir dari evaluasi kebijakan publik, untuk penentuan apa yang seharusnya dilakukan selanjutnya.

Setidaknya ada tiga hal yang dapat dilakukan oleh seorang evaluator di dalam melakukan evaluasi kebijakan publik menurut Lester dan Stewart dalam Winarno (2002:170) yakni:

1. Evaluasi kebijakan mungkin menjelaskan keluaran-keluaran kebijakan, seperti misalnya pekerjaan, uang, materi yang diproduksi, dan pelayanan yang disediakan. Keluaran ini merupakan hasil yang nyata dari adanya kebijakan, namun tidak memberi makna sama sekali bagi seorang evaluator. Kategori yang lain menyangkut dampak yang dihasilkan oleh kebijakan publik terhadap kelompok-kelompok yang telah ditargetkan, atau keadaan yang ingin dihasilkan dari kebijakan publik. Pada saat seorang evaluator menganalisis

konsekuensi-konsekuensi yang dihasilkan tersebut, maka seorang evaluator harus menjelaskan bagaimana kebijakan ditampilkan dalam hubungannya dengan keadaan yang dituju.

2. Evaluasi kebijakan barangkali mengenai kemampuan kebijakan dalam memperbaiki masalah-masalah sosial, seperti misalnya usaha untuk mengurangi kemacetan lalu lintas atau mengurangi tingkat kriminalitas.
3. Evaluasi kebijakan barangkali menyangkut konsekuensi-konsekuensi kebijakan dalam bentuk *policy feedback*, termasuk didalamnya adalah reaksi dari tindakan-tindakan pemerintah atau pernyataan dalam sistem pembuatan kebijakan atau dalam beberapa pembuat keputusan.

Pada dasarnya suatu evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sejauh mana program-program kebijakan yang telah dijalankan mampu menyelesaikan masalah-masalah publik. Ini berarti bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sejauh mana tingkat efektifitas dan efisiensi suatu program kebijakan dijalankan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada.

Parsons (1995:543), menyatakan terdapat dua tipe dalam evaluasi, yakni:

1. *Formative evaluation*

Evaluasi formatif yaitu evaluasi yang dilaksanakan pada saat sebuah kebijakan atau program sedang dilaksanakan yang didalamnya terdapat analisis yang meluas terhadap program yang dilaksanakan dan kondisi-kondisi yang mendukung bagi suksesnya implementasi tersebut (Palumbo dalam Parsons: 1995). Fase implementasi membutuhkan evaluasi "formatif", yang akan memonitor kemana arah dijalankannya program sehingga dapat menyediakan umpan balik (*feedback*) yang mungkin digunakan untuk pengembangan/perbaikan proses implementasi.

2. *Summative Evaluation*

Evaluasi summatif digunakan untuk mengukur bagaimana sebuah kebijakan atau program telah memberikan dampak terhadap masalah yang telah ditujukan di awal (Palumbo dalam Parsons, 1995). Evaluasi summatif masuk dalam tahap *pos-implementations*, yakni dilakukan ketika kebijakan program sudah selesai digunakan, dan dengan mengukur/melihat dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan/program tertentu. Tipe evaluasi summatif ini menekankan pada hasil yang telah dicapai dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Selain itu, evaluasi implementasi kebijakan dibagi menjadi tiga menurut *timing* evaluasi, yaitu sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan. Evaluasi sebelum pelaksanaan disebut evaluasi *summatif*. Evaluasi pada waktu pelaksanaan dan berkenaan dengan proses implementasi disebut evaluasi proses. Evaluasi setelah kebijakan disebut sebagai evaluasi konsekuensi (*output*) kebijakan dan/atau evaluasi dampak/pengaruh (*outcome*) kebijakan (Nugroho, 2003:195).

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini mengarah pada tipe penelitian evaluasi proses, yaitu melihat bagaimana proses implementasi suatu kebijakan dilaksanakan. Dengan kata lain evaluasi dapat pula digunakan untuk melihat apakah proses pelaksanaan suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan (*guidelines*) yang telah ditentukan. Dengan demikian yang dijadikan ukuran keberhasilan suatu program adalah kesesuaian

proses implementasi suatu kebijakan publik dengan garis petunjuk (*guidelines*) yang telah ditentukan.

Henry dalam Wiyoto (2005:55-76) mengidentifikasi aneka ragam riset evaluasi ke dalam 7 (tujuh) tipe utama, yaitu:

- a. *Front-end Analyses.*
- b. *Evaluability Assessments.*
- c. *Cost-Benefit and Cost-Effectiveness Analyses.*
- d. *Process or Implementation Evaluation.*
- e. *Effectiveness, Outcome, or Impact Evaluation.*
- f. *Program and Problem Monitoring.*
- g. *Meta-Evaluation, Evaluation Syntheses or Comprehensive Evaluation.*

Apabila dikaitkan dengan konsep yang dikemukakan oleh Henry dalam Wiyoto (2005:61-62) tentang tipe-tipe riset evaluasi, maka dalam penelitian ini peneliti menekankan pada tipe *Process or Implementation Evaluation*, yaitu riset evaluasi program yang menilai sejauh mana sebuah program berjalan seperti yang dikehendaki (ditetapkan). Riset ini mengevaluasi suatu proses dari aktivitas yang ada dalam sebuah pelaksanaan kebijakan. Secara ringkas menegaskan evaluasi implementasi menekankan pada isu strategik pada persoalan tentang: “*How did the program operate?*”, atau “*What happened?*”, atau “*What did the program do?*”. Seperti manajemennya, kesesuaian dengan aturan legal, perencanaan strategik yang dibuat, penyelenggaraannya, biaya, dan proses pelaksanaannya secara detail. Dalam hal ini adalah pelaksanaan kebijakan Perda No.10 tahun 2011 tentang Pengarustamaan gender dalam pembangunan daerah Propinsi Lampung khususnya dalam rumusan kebijakan bidang pendidikan.

Julia C. Mosse, dalam buku *Gender dan Pembangunan*, menyatakan gender adalah seperangkat peran (seperti halnya kostum / topeng di teater) yang menyampaikan kepada orang lain bahwa kita feminim / maskulin. (1996:3). Gender juga merupakan suatu pemahaman sosial budaya tentang apa dan bagaimana perempuan dan laki-laki seharusnya berperilaku. Perbedaan tersebut bukan merupakan kodrat melainkan diciptakan oleh masyarakat (perempuan dan laki-laki) melalui proses sosial budaya yang panjang. (Oakley dalam Fakih:2002:171). Sementara itu konsep jenis kelamin / seks mengacu pada perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki; pada perbedaan tubuh perempuan dan laki-laki. Dengan demikian jenis kelamin bersifat biologis dan dibawa sejak lahir sehingga tidak dapat diubah. (Kerstan dalam Sunarto:112).

Dengan demikian, gender juga tidak hanya membahas persoalan perempuan, melainkan bagaimana relasi perempuan dan laki-laki terselenggara, bagaimana kepentingan perempuan dan laki-laki diperhatikan/ditampung (akomodasi) oleh pembuat kebijakan. Kekeliruan cara pandang tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh budaya (ideologi) *patriarchy* (*patriarch* = bapak) yaitu budaya kekuasaan sang bapak. Artinya bapak menguasai semua anggota keluarganya, semua harta milik, serta sumber-sumber ekonomi dan membuat semua keputusan penting. Ideologi ini menyatakan bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibanding perempuan; bahwa perempuan harus dikuasai oleh laki-laki dan merupakan bagian dari harta milik laki-laki. (Basin & Khan: 25). Gagasan ini telah terinternalisasi di dalam masyarakat hingga hari ini.

Pengarusutamaan Gender (PUG) ditetapkan pertama kali oleh Konferensi Perempuan Dunia Ke-4 di Beijing tahun 1995. Menurut definisi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, PUG adalah strategi agar kebutuhan dan pengalaman perempuan dan laki-laki menjadi bagian tak terpisahkan dari desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan dan program dalam seluruh lingkup politik, ekonomi, dan sosial sehingga perempuan dan laki-laki sama-sama mendapatkan keuntungan, dan ketidakadilan tidak ada lagi (Silawati, 2006:20). Dengan kata lain Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan suatu strategi untuk menjamin bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari seluruh kebijakan program dan proyek di seluruh sektor pembangunan telah memperhitungkan dimensi/aspek gender. Dimensi/aspek gender melihat laki-laki dan perempuan sebagai pelaku (subyek dan obyek) yang setara dalam akses, partisipasi dan kontrol atas pembangunan serta dalam memanfaatkan hasil pembangunan.

### **III. METODE**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kebijakan (*research policy*) dengan pendekatan metode kualitatif. Ann Majchrzak (1984) dalam Sudarwan Danim (1997: 23) mendefinisikan penelitian kebijakan sebagai proses penyelenggaraan penelitian untuk mendukung kebijakan atau analisis terhadap masalah-masalah sosial yang bersifat fundamental secara teratur untuk membantu pengambil kebijakan memecahkan masalah dengan jalan menyediakan rekomendasi yang berorientasi pada tindakan atau tingkah laku pragmatik.

Menurut Sudarwan Danim (1997: 28) penelitian kebijakan hanyalah tipe atau bentuk penelitian dengan dua orientasi utama, yaitu berorientasi kepada tindakan dan berorientasi kepada masalah-masalah yang bersifat fundamental. Penelitian kebijakan dapat dimulai dengan paparan deskriptif dari hasil temuan peneliti di lapangan yang dihubungkan dengan normatif kebijakan yang ada, kemudian kesimpulan dari penelitian kebijakan ini akan dapat digunakan sebagai bentuk rekomendasi yang dapat diterapkan oleh implementor kebijakan tersebut. Dari uraian tersebut diatas penelitian ini, peneliti memfokuskan pada tipe *Process or Implementation Evaluation*, yaitu riset evaluasi kebijakan yang menilai sejauh mana sebuah kebijakan berjalan seperti yang dikehendaki (ditetapkan). Pendekatan inilah yang digunakan untuk mengevaluasi bentuk kebijakan yang responsif gender khususnya di bidang pendidikan di Propinsi Lampung.

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan cara sengaja (*purposive*) yaitu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung sebagai institusi perancang dan juga pelaksana atas kebijakan pendidikan di Propinsi Lampung dan Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Propinsi Lampung sebagai pengawas kebijakan yang bermainstreaming gender di Propinsi Lampung.

### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Provinsi Lampung telah mengadopsi kebijakan PUG dalam pembangunan daerah sejak tahun 2002 yang ditandai dengan keluarnya Instruksi Gubernur Nomor INST/02/B/VIII/HK/2002 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Landasan hukum kebijakan PUG tersebut terus

diperbaharui hingga tahun 2011 dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang PUG dalam Pembangunan Daerah. Sejak saat itu, Indeks Pemberdayaan Gender (GEM), yaitu tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik dan ekonomi meningkat. GEM di Provinsi Lampung pada tahun 2007 adalah 61,4 sedangkan pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2008 GEM Provinsi Lampung mencapai angka 62,81. Hal ini menunjukkan bahwa GEM Provinsi Lampung telah mengalami peningkatan, walaupun angka tersebut dapat dikatakan belum signifikan. Peningkatan juga terjadi pada Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (HDI) di Provinsi Lampung dimana pada tahun 2007 HDI Provinsi Lampung adalah 69,4 yang kemudian meningkat pada tahun 2008 hingga mencapai angka 70,3. Sama halnya dengan GEM, peningkatan HDI juga belum dapat dikatakan signifikan. Apalagi jika dibandingkan dengan beberapa provinsi lainnya, HDI Provinsi Lampung hanya masuk ke dalam kategori sedang.

Pada pembahasan ini, peneliti menguraikan pelaksanaan kebijakan PUG bidang pendidikan di Provinsi Lampung telah tercapai atau belum sesuai dengan peraturan yang ditetapkan yaitu Perda No.10 tahun 2011. Sesuai dengan Pasal 6 (g), Perda No.10 tahun 2011, Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah bahwa kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di daerah juga meliputi pelaksanaan PUG terkait dengan bidang pembangunan terutama bidang pendidikan. Kemudian dijelaskan pada Pasal 9 bahwa untuk mewujudkan tujuan PUG lembaga pemerintahan mempunyai tugas berikut:

- a. Menyelenggarakan kegiatan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam pengarusutamaan gender;
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), advokasi dan sosialisasi pengarusutamaan gender; dan
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender serta PUG.

Upaya Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dalam mewujudkan PUG bidang pendidikan sesuai dengan Perda No.10 tahun 2011 adalah dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 800/ 432/ III.01/ DP.5/ 2011 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Satuan Kerja Penguatan Kelembagaan PUG Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011. Tim kelompok kerja mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan unit kerja terkait baik di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional/dinas yang bertanggungjawab terhadap pembangunan pendidikan di provinsi maupun kabupaten/kota serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan PUG bidang pendidikan;
2. Menyiapkan rumusan bahan kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional/dinas yang bertanggungjawab terhadap pembangunan pendidikan di provinsi maupun kabupaten/kota;
3. Menyiapkan rumusan rencana aksi nasional/daerah yang diperlukan pada berbagai unit kerja terkait sebagai persiapan untuk melaksanakan gerakan PUG bidang pendidikan, baik tingkat nasional maupun daerah. Melalui keputusan tersebut, tim kelompok kerja PUG membuat kegiatan PUG bidang pendidikan tahun 2011.

Berdasarkan tugas-tugas tim kelompok kerja yang telah disebutkan di atas, maka kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh tim kelompok kerja tersebut diantaranya adalah :

- a. Pelatihan penyusunan rencana aksi daerah tentang PUG bidang pendidikan
- b. Sosialisasi PUG bidang pendidikan bagi guru Dikdasmen
- c. Pembuatan ilustrasi lembar kerja siswa
- d. Penyusunan profil gender pendidikan
- e. Pembuatan poster, brosur, dan spanduk PUG bidang pendidikan

Melalui proses perencanaan tersebut, maka tim kelompok kerja PUG telah membuat kegiatan bidang pendidikan. Beberapa kegiatan tersebut meliputi:

1. Sosialisasi PUG bidang pendidikan untuk para pengambil kebijakan di kabupaten, landasan kegiatan ini dilakukan adalah karena masih banyak para pengambil kebijakan, dan pelaksana kebijakan yang belum memahami isu-isu gender bidang pendidikan dan ketimpangan gender bidang pendidikan;
2. Pengembangan model PUG, karena masih banyak kabupaten/kota yang belum mengintegrasikan PUG bidang pendidikan;
3. Pelatihan pengembangan model strategi pembelajaran responsif gender untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPS, karena model pengajaran di sekolah dasar pada umumnya belum responsif gender, guru-guru yang bersangkutan belum memahami model pembelajaran yang responsif gender.

Setelah kegiatan PUG bidang pendidikan dibuat, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan kegiatan tersebut. Acuan penyelenggaraan program PUG bidang pendidikan tahun 2010, hal yang penting dalam implementasi kegiatan PUG bidang pendidikan adalah:

1. Metode yang digunakan para narasumber dan fasilitator harus menyenangkan, terbuka untuk melakukan dialog dan membicarakan perbedaan-perbedaan pandangan;
2. Proses pembelajaran harusnya memperhatikan prinsip pembelajaran orang dewasa;
3. Materi kegiatan hendaknya menuntut tagihan kepada para peserta berupa karya, gagasan dalam bentuk rencana tindak lanjut PUG di lingkungan kerja masing-masing;
4. Penyajian hasil analisis kebijakan pendidikan berwawasan gender perlu dijadikan agenda utama dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

Pada dasarnya kegiatan PUG di bidang pendidikan ini telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang disusun pada tahun 2011. Kegiatan PUG bidang pendidikan tahun 2011 dilaksanakan sejak bulan Mei hingga November dengan pembuatan laporan akhir di bulan Desember. Salah satu indikator keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan PUG bidang pendidikan ini adalah terlaksananya kegiatan yang telah dibuat pada tahun anggaran 2011 hingga pembuatan laporan pada akhir tahunnya. Selain itu, dapat dilihat juga berdasarkan rendahnya ketimpangan pendidikan dasar antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan pendidikan masih terjadi seperti pada APtS laki-laki yang lebih tinggi daripada perempuan. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.

Komitmen politik diperlukan agar kebijakan ini tidak hanya berjalan sepihak saja tetapi juga mendapatkan dukungan serta *back-up* dari pihak lain,



dalam hal ini seperti pemerintah daerah setempat (Kabupaten/Kota). Dukungan juga sepatutnya diberikan oleh dinas-dinas terkait, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Dukungan yang diberikan oleh pihak dinas ini berupa Keputusan Nomor: 800/432/III.01/DP.5/2011 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Satuan Kerja. Dalam keputusan tersebut berisi tentang apa saja tugas-tugas yang harus dilakukan oleh Kelompok Kerja guna melaksanakan kebijakan PUG tersebut. Seperti pelaksanaan kebijakan-kebijakan lainnya, dukungan yang diberikan tentu memiliki kekurangan yaitu berupa kurangnya pemahaman pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam melaksanakan dan mendukung berjalannya Tim Kelompok Kerja yang telah dibentuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Permasalahan lainnya timbul akibat kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait mengenai kebijakan ini, sehingga komitmen yang telah dibuat tetap saja kurang berjalan dengan maksimal.

Dalam hal ini juga sumber daya finansial juga menjadi indikator penting dalam berjalannya pelaksanaan kebijakan PUG, sehingga pelaksanaan kebijakan yang pada umumnya membutuhkan dana guna menunjang terselenggaranya berbagai kegiatan yang bersangkutan dapat dikelola dengan baik. Sumber daya finansial ini menjadi suatu hal yang penting karena meskipun SDM yang tersedia telah memiliki kualitas yang baik, tetapi tidak ditunjang dengan dana yang memadai maka kegiatan yang akan dilaksanakan pun pada akhirnya tidak akan berjalan dengan baik. Dana dalam pelaksanaan kegiatan ini pada dasarnya telah cukup banyak karena bersumber dari APBN dan APBD. Yang menjadi penghambat dalam indikator ini adalah adanya kenyataan bahwa tidak setiap pengajuan dana yang telah diajukan, cair secara bersamaan. Sehingga inilah yang menjadi kendala dalam terlaksananya kegiatan yang telah direncanakan.

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun, Siswa Menurut Status Sekolah Tahun 2010/2011, AU, APtS, APK, dan APM Pendidikan Dasar di Provinsi Lampung Tahun 2010/2011 :**

No	Kabupaten/Kota	Penduduk Usia 7-12 Tahun 2010/2011		Siswa Sekolah Dasar Tahun 2010/2011		AU Tahun 2010/2011		APtS Tahun 2010/2011		APK Tahun 2010/2011		APM Tahun 2010/2011	
		L	P	N + S		L	P	L	P	L	P	L	P
				L	P								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Bandar Lampung	48.163	46.702	55.613	79.504	1.277	1.158	6	8	115,90	125,12	101,10	103,27
2	Lampung Selatan	54.051	51.762	53.544	53.727	120	105	67	61	112,18	117,90	93,39	101,13
3	Lampung Tengah	71.256	72.310	76.900	76.118	4.843	4.781	196	188	113,93	111,27	101,01	96,78
4	Lampung Utara	38.747	39.376	39.812	40.755	275	288	12	16	111,08	111,98	96,46	96,88
5	Lampung Barat	27.530	24.559	26.044	24.749	59	53	44	54	104,48	112,14	83,99	94,39
6	Tulangbawang	25.212	26.556	27.303	27.822	214	211	126	138	115,10	110,65	93,77	91,23
7	Tanggamus	34.062	32.470	33.819	31.870	164	148	72	62	109,74	109,64	96,86	104,05
8	Lampung Timur	52.858	53.542	54.579	55.029	2.071	2.185	131	105	117,58	116,47	9,93	99,85
9	Metro	7.365	7.847	8.146	7.979	266	258	0	0	119,99	110,32	101,97	96,84
10	Way Kanan	24.668	25.731	26.032	26.545	835	849	68	60	114,88	111,21	99,83	95,92
11	Pesawaran	28.272	29.492	25.970	26.456	680	685	94	98	111,17	108,47	90,01	81,69
12	Pringsewu	22.932	23.720	23.496	21.822	61	52	54	68	112,53	101,47	92,27	91,51
13	Tulangbawang Barat	15.715	16.306	14.854	16.537	53	45	126	116	102,21	109,41	93,36	93,09
14	Mesuji	12.646	13.864	12.291	13.286	36	28	49	57	105,75	103,66	92,36	90,49
<b>Jumlah</b>		<b>463.927</b>	<b>464.237</b>	<b>466.404</b>	<b>473.175</b>	<b>10.954</b>	<b>10.846</b>	<b>1.045</b>	<b>1.031</b>	<b>112,60</b>	<b>112,97</b>	<b>96,28</b>	<b>96,75</b>

Sumber : Profil Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Tahun 2010/2011

Keterangan : L (Laki-Laki), P (Perempuan), N (Negeri), S (Swasta), AU (Angka Mengulang), APtS (Angka Putus Sekolah), APK (Angka Partisipasi Kasar), APM (Angka Partisipasi Murni).

Sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci pokok dalam setiap pelaksanaan suatu kebijakan. SDM adalah salah satu komponen kunci dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, tanpa ada SDM yang mengimplementasikan suatu kebijakan yang telah dibuat, maka kebijakan tersebut hanya sebagai kebijakan yang tidak dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif dalam mengatasi masalah publik seperti masalah ketimpangan dalam bidang pendidikan. Dalam kebijakan ini misalnya, sumber daya manusia yang harus bergerak secara optimal adalah Tim Kelompok Kerja yang telah dibuat oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Sumber daya manusia yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu kepada tim kelompok kerja satuan kerja penguatan kelembagaan PUG bidang pendidikan tahun anggaran 2011. Tim Kelompok Kerja yang telah dibentuk tersebut adalah :

**Tabel 2. Tim Kelompok Satuan Kerja Penguatan Kelembagaan PUG Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011**

No	Nama	Jabatan dalam Dinas Rutin	Kegiatan
<b>A</b>	<b>Panitia</b>		
1	Ir. Yandri Nazir, M.M	Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung	Penasehat
2	Ir. Edi Yanto, M.Si	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Penasehat
3	Ir. Chairia Pandarita, M.M	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan	Pembina
4	Drs. Tauhidi, M.M	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Penanggungjawab
5	Dra. RA Syamubi	Kabid PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Ketua
6	Khairul Alamsyah, S.Sos	Kasi Dikmas Dinas Pendidikan Prov. Lampung	Wakil Ketua
7	Dra. Suslina Sari	Kasi PAUD Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Sekretaris
<b>B</b>	<b>Tim Pakar</b>		
1	Drs. Ikram, M.Si	Unsur Perguruan Tinggi	Koordinator
2	Endry Fatimaningsih, S.Sos, M.Si	Unsur Perguruan Tinggi	Anggota
3	Drs. Sigit Krisbintoro	Unsur Perguruan Tinggi	Anggota
4	Dr. Hartoyo, M.Si	Unsur Perguruan Tinggi	Anggota
5	Rahayu Sulistyawati, S.Sos, M.Si	Unsur Perguruan Tinggi	Anggota
<b>C</b>	<b>Tim Teknis</b>		
1	Eka Silakarna, S.Sos	Biro PP Provinsi Lampung	Koordinator
2	Supriono, S.Sos, M.M	Kasubdin SDM Naker Bappeda Provinsi Lampung	Anggota
3	Ir. Herum Fajarwati, M.M	Kepala Bidang Badan Pusat Statistik (BPS)	Anggota
4	Dra. Eli Yuniar	Kasi Lanjut Usia Dinkessos Provinsi Lampung	Anggota
5	Nabhan, S.H	Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Anggota
<b>D</b>	<b>Sekretariat</b>		
1	Hartini	Staf Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Koordinator
2	Laila Sagita, S.Pd	Staf Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Anggota
3	Mulyani	Staf Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Anggota

Sumber : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Nomor: 800/432/III.01/DP.5/2011 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Satuan Kerja Penguatan Kelembagaan PUG Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011

Koordinasi dari pihak yang berkaitan, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan *stakeholders* terkait juga menjadi indikator penting dalam pencapaian tujuan dari suatu implementasi kebijakan. Koordinasi dilakukan tidak hanya dengan institusi terkait namun juga dengan berbagai pihak yang ikut berperan serta seperti Tim Kelompok Kerja yang telah dibentuk oleh Dinas Pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian, indikator ini telah berjalan dengan baik. Koordinasi juga berjalan dengan sistem *top-down* sehingga koordinasi ini dirasakan oleh semua pihak yang terkait dengan kebijakan PUG ini.

Indikator selanjutnya adalah dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat diperlukan guna mewujudkan asas demokrasi yang dianut pemerintahan kita. Dengan adanya dukungan ini, maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pemerintahan, dan pelaksanaan kebijakan ini pun akan terwujud dengan baik. Dukungan masyarakat dalam konteks kebijakan ini adalah mengacu pada dukungan atas formulasi kebijakan PUG bidang pendidikan itu sendiri. Sehingga pada dasarnya hal ini belum dapat dikatakan sebagai indikator pelaksanaan kebijakan PUG tersebut. Namun, dengan adanya dukungan masyarakat terhadap kebijakan ini, maka kebijakan PUG ini dapat berjalan dengan baik. Dukungan yang ada hingga saat ini dikatakan masih minim karena kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak terkait dalam rangka mengenalkan adanya kebijakan PUG. Hal ini menyebabkan partisipasi masyarakat yang didapat hingga tahun 2011 masih sangat rendah.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan tidak terlepas dari kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang memadai. Dengan adanya kondisi ketiga aspek tersebut yang mendukung berlangsungnya pelaksanaan kebijakan, maka jalannya kebijakan tersebut akan lebih lancar dan dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai. Namun, masih ada berbagai fenomena yang terjadi akibat kurang seimbangnya ketiga aspek tersebut. Diantaranya adalah pengangguran. Hal ini terjadi karena kondisi ekonomi di Provinsi Lampung yang belum stabil dan juga tingkat pendidikan masyarakatnya yang masih rendah.

Permasalahan lainnya yaitu kurangnya kesadaran dari pengambil dan pelaksana kebijakan atas pentingnya keadilan dan kesetaraan gender menjadi salah satu faktor belum berjalan dengan baiknya kebijakan PUG ini. Sehingga instrumen-instrumen yang berpengaruh tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan merasa tidak perlu bersusah-susah dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Menurut penelitian terdahulu (Simbolon, 2011) terdapat beberapa kendala internal dan kendala eksternal dalam implementasi PUG, yaitu sebagai berikut:

1. Kendala internal dalam proses implementasi kegiatan PUG bidang pendidikan dasar tahun 2011 adalah terkait dengan sumber daya manusia yaitu masih banyak para pemegang keputusan, peneliti, perencana, para pengelola, pelaksana, dan *stakeholders* seperti (penerbit buku) bidang pendidikan yang belum memahami konsep gender, dan substansi kebijakan, program, kegiatan PUG bidang pendidikan. Ketidakhahaman tersebut berdampak pada tidak maksimalnya implementasi kebijakan PUG bidang pendidikan di Provinsi Lampung. Dapat dilihat dari indikator *output* belum sesuai dengan yang ditetapkan. Rendahnya kesadaran kabupaten/kota dalam membuat advokasi kelompok kerja PUG bidang pendidikan meskipun kelompok kerja telah terbentuk. Hal ini berdampak pada tingginya

ketergantungan kabupaten/kota terhadap provinsi. Rendahnya kesadaran kabupaten/kota dalam mengintegrasikan PUG bidang pendidikan dapat dilihat dari kelompok kerja PUG bidang pendidikan kabupaten/kota masih banyak yang belum memperoleh dukungan dana APBD. Kemudian, tingginya frekuensi keluar masuk pengurus kelompok kerja yang diakibatkan seringnya melakukan mutasi/*rolling* pegawai, sehingga tidak dapat menerapkan konsep PUG yang telah dipahami pegawai tersebut. Pegawai baru harus diberikan pemahaman dan pelatihan agar dapat memahami konsep PUG bidang pendidikan, dalam memberikan pemahaman dan pelatihan bukan dalam jangka waktu yang singkat, karena harus memahami konsep gender dari dasar. Selain itu, anggaran juga menjadi salah satu kendala internal dalam mengimplementasikan kebijakan PUG bidang pendidikan di Provinsi Lampung. Anggaran dana kegiatan PUG bidang pendidikan belum dapat menjangkau pelatihan dalam skala besar setiap tahun anggaran. Hal ini diperparah dengan jumlah kabupaten/kota yang tidak melakukan anggaran atas kegiatan PUG bidang pendidikan sehingga memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap provinsi.

2. Kendala eksternal dalam proses implementasi kegiatan PUG bidang pendidikan dasar tahun 2011 adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mewujudkan kebijakan PUG bidang pendidikan dasar di Provinsi Lampung. Hal ini terjadi karena sosialisasi yang dilakukan oleh implementor kebijakan tidak dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu, didukung oleh kondisi sosial masyarakat yang masih menganut budaya patrilineal dan patriarki. Sehingga sulit untuk menerima paradigma baru seperti konsep gender. Budaya patriarki telah membudaya dalam masyarakat sejak dahulu, sehingga tidak mudah untuk mengubah pola pikir masyarakat atas kesamaan hak antara laki-laki dengan perempuan atau memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dengan perempuan khususnya bidang pendidikan. Kendala lain yang menjadi pendorong minimnya partisipasi masyarakat adalah kondisi ekonomi. Ekonomi masyarakat Lampung masih tergolong menengah ke bawah atau rendah. Kondisi ini dapat dilihat dari angka pengangguran di Lampung, dan pendidikan masyarakat Lampung. Kondisi ini mengakibatkan banyak anak perempuan yang tidak memperoleh haknya yaitu mengenyam pendidikan layaknya anak laki-laki. Pembatasan akses pendidikan untuk perempuan masih tinggi, dan banyak orang awam yang beranggapan bahwa perempuan tidak harus memiliki pendidikan yang tinggi seperti laki-laki.

Dengan melihat tujuan kebijakan PUG yang telah dipaparkan sebelumnya, menganalisis permasalahan-permasalahan yang timbul serta melihat kendala-kendala yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini, maka dampak-dampak pasca-diterapkannya kebijakan PUG ini akan timbul. Dampak-dampak yang timbul setelah berlangsungnya penerapan kebijakan PUG ini antara lain adalah peran serta perempuan dalam bidang pendidikan, politik, dan ekonomi masih minim dan masih terdapat ketimpangan gender dengan kaum laki-laki. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga belum maksimal, ditandai dengan belum berjalannya kebijakan tersebut di Kabupaten/Kota seperti yang telah direncanakan sebelumnya

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah didiskusikan, dapat diambil kesimpulan-kesimpulan berikut :

1. Telah ada komitmen politik yang cukup baik dari pemerintah provinsi dalam melaksanakan kebijakan gender pendidikan di provinsi Lampung. Dukungan yang diberikan oleh pihak dinas ini berupa ikeluarkannya Keputusan Nomor: 800/432/III.01/DP.5/2011 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Satuan Kerja yang bertugas melaksanakan kebijakan PUG bidang pendidikan. Namun kurangnya pemahaman pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ini. Permasalahan lainnya timbul akibat kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait mengenai kebijakan ini
2. Sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci pokok dalam setiap pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam kebijakan ini misalnya, sumber daya manusia yang harus bergerak secara optimal adalah Tim Kelompok Kerja yang telah dibuat oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Sedangkan sumber daya finansial dalam pelaksanaan kegiatan ini pada dasarnya telah cukup banyak karena bersumber dari APBN dan APBD. Yang menjadi penghambat dalam indicator ini adalah adanya kenyataan bahwa tidak setiap pengajuan dana yang telah diajukan cair secara bersamaan. Sehingga inilah yang menjadi kendala dalam terlaksananya kegiatan yang telah direncanakan.
3. Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi ini telah berjalan dengan baik. Koordinasi juga berjalan dengan sistem *top-down* sehingga koordinasi ini dirasakan oleh semua pihak yang terkait dengan kebijakan PUG ini.
4. Dukungan masyarakat yang ada hingga saat ini dapat dikatakan masih minim karena kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak terkait dalam rangka mengenalkan adanya kebijakan PUG. Hal ini menyebabkan partisipasi masyarakat yang didapat hingga tahun 2011 masih sangat rendah.
5. Kondisi ekonomi, social dan politik di Provinsi Lampung yang belum stabil dan juga tingkat pendidikan masyarakatnya yang masih rendah menyebabkan pelaksanaan kebijakan ini tidak dapat maksimal.
6. Kendala internal dalam proses implementasi kegiatan PUG bidang pendidikan dasar tahun 2011 adalah terkait dengan sumber daya manusia yaitu masih banyak para pemegang keputusan, peneliti, perencana, para pengelola, pelaksana, dan *stakeholders* seperti (penerbit buku) bidang pendidikan yang belum memahami konsep gender, dan substansi kebijakan, program, kegiatan PUG bidang pendidikan. Rendahnya kesadaran kabupaten/kota dalam membuat advokasi kelompok kerja PUG bidang pendidikan meskipun kelompok kerja telah terbentuk. Kemudian, tingginya frekuensi keluar masuk pengurus kelompok kerja yang diakibatkan seringnya melakukan mutasi/*rolling* pegawai, sehingga tidak dapat menerapkan konsep PUG yang telah dipahami pegawai tersebut. Anggaran juga menjadi salah satu kendala internal dalam mengimplementasikan kebijakan PUG bidang pendidikan di Provinsi Lampung. Anggaran dana kegiatan PUG bidang pendidikan belum dapat menjangkau pelatihan dalam skala besar setiap tahun anggaran. Hal ini diperparah dengan jumlah kabupaten/kota yang tidak mengalokasikan anggaran atas kegiatan PUG bidang pendidikan sehingga

memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap provinsi. b) Kendala eksternal dalam proses implementasi kegiatan PUG bidang pendidikan dasar tahun 2011 adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mewujudkan kebijakan PUG bidang pendidikan dasar di Provinsi Lampung. Selain itu, didukung oleh kondisi sosial masyarakat yang masih menganut budaya patrilineal dan patriarki. Sehingga sulit untuk menerima paradigma baru seperti konsep gender. Kendala lain yang menjadi pendorong minimnya partisipasi masyarakat adalah kondisi ekonomi. Ekonomi masyarakat Lampung masih tergolong menengah ke bawah atau rendah yang menyebabkan banyak anak perempuan yang tidak memperoleh haknya yaitu mengenyam pendidikan layaknya anak laki-laki.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang kami berikan untuk perbaikan di masa yang akan datang, sebagai berikut :

#### 1. Bagi Dinas Pendidikan

Dinas pendidikan harus lebih meningkatkan kinerjanya sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk implementasi kebijakan PUG dapat berjalan dengan baik dan dapat dikatakan sukses/berhasil. Koordinasi yang dijalin oleh Dinas Pendidikan Provinsi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota harus lebih intens lagi sehingga hal-hal kecil yang patut didiskusikan bersama dapat didiskusikan sehingga implementasi kebijakan PUG ke depannya menjadi lebih baik lagi. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak dinas mengenai pengenalan kebijakan PUG ini kepada masyarakat juga harus dilakukan dengan lebih optimal dan maksimal. Dengan demikian kesadaran pelaksana kebijakan pun akan meningkat, sehingga kegiatan yang dihasilkan akan menjadi lebih baik.

Dinas Pendidikan bersama dengan DPRD mengelola anggaran untuk kebijakan PUG ini agar dana dari APBN dan APBD yang telah disediakan dapat terkelola dan terealisasi dengan baik sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan. Kegiatan yang dilakukan sarannya jangan hanya untuk mendapat dukungan dari masyarakat saja tetapi juga untuk mengajak serta masyarakat ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dihasilkan dari kebijakan tersebut.

#### 2. Bagi Tim Kelompok Kerja

Agar berjalan dengan lebih efektif dan efisien, tim kelompok kerja yang telah dibentuk dibagi-bagi lagi tugas-tugasnya secara lebih rinci. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan yang dilaksanakan dapat lebih terasa manfaatnya bagi banyak pihak. Rekomendasi lainnya adalah agar dapat bergerak tidak hanya di tingkat provinsi, tim ini harus dibentuk pula sub-bagiannya sehingga pekerjaan mengenai kegiatan yang mengharuskan turun lapang dapat terbantu dengan adanya “perpanjangan tangan” tim tersebut. Diusahakan pula anggota yang terdapat di dalamnya bukan hanya dari pihak dinas, universitas, dan sebagainya seperti pada Tim Kelompok Kerja, namun juga memuat partisipasi masyarakat maupun LSM atau ormas-ormas yang sekiranya berkaitan dengan kebijakan PUG tersebut. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan tidak hanya berada di kalangan itu-itu

saja, tetapi juga mencakup keseluruhan sehingga dukungan dan peran serta masyarakat terutama kaum perempuan dapat terjalin dengan lebih maksimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Allison, Michael & Jude, Kaye. (2005). *Strategic planning for nonprofit organization: A practical guide and workbook*. USA: John Wiley&Sons.
- Bryson, John M. (1995). *Strategic planning for public and nonprofit organization*. San Francisco: Jossey- Bass.
- Conyers, Diana & Hill, Peter. (1984). *An introduction to development planning in the third world*. Chichester: Wiley.
- David, Fred R. (2007). *Strategic management concepts & cases*. 11<sup>th</sup> ed. Pearson Education: Prentice-Hall, Inc.
- Danim, Sudarwan. 1997. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Ferdinand, Augusty T. (2002) *Structural Equation Modeling dalam Penelitian Manajemen. Aplikasi Model-model Rumit Dalam Penelitian Untuk Tesis Magister dan Disertasi Doktor*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Friedman, Thomas L. (2006). *The world is flat*. Jakarta: PT Dian Rakyat.
- Fukuyama, Francis. (1995). *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity*. New York: The Free Press.
- Gluck, F., Kaufman, S., Walleck, S. (1982). The four phase of strategic management. *The Journal of Business Strategy*, 2(3), 9-21.
- Glueck, W.F & Jauch, L.R. (1989). *Manajemen strategis dan kebijakan perusahaan*. Edisi ke 2, (alih bahasa Drs. Murad, Msc. dan A.R. Henry Sitanggang, SH). Jakarta: Erlangga.
- Grant, Robert T. (1999). *Analisis strategi kontemporer: Konsep, teknik, aplikasi*. Ed. 2, alihbahasa. Thomas Secokusumo, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Heene, Aime' & Desmidt, Sebastian. (2010). *Manajemen strategik keorganisasian publik*. Ed: Gunarsa, Aep. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hitt, Michael A., Ireland, R. Duane., Hoskisson, Robert E. (1995). *Strategic management: Competitiveness and globalization*. West Publishing Company.
- Hunger, J. David, dan Thomas L. Wheelen. (2001). *Strategic management*. Massachusetts: Adison-Wesley.
- Jurnal Perempuan No. 51. Januari 2007. *Mengapa Mereka Diperdagangkan?*. YJP. Jakarta.
- Laporan Independen NGO's. Mei 2007. *Implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) di Indonesia*. CEDAW Working Group Initiative (CWGI). Jakarta.
- Sulistiowati, Rahayu, Meiliyana, Caturiani S.I, 2009 Analisis Kebijakan Responsif Gender, Laporan penelitian tidak dipublikasikan
- Simbolon, Susi, 2011, Implementasi Kebijakan Responsif Gender Bidang Pendidikan Provinsi Lampung, Skripsi, tidak dipublikasikan
- Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 10 tahun 2011, tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.